



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

S

**BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

Kata Pangantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat diselesaikan. LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menuju terwujudnya Good Governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Bandar Lampung, Januari 2025

Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung

Desti Mega Putri,SP.,MT
NIP. 19691202 199503 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah salah satu cara untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa perjanjian kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. LAKIP sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program tahun sebelumnya dan juga sebagai bahan dalam penyusunan program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2023;

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung; adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam

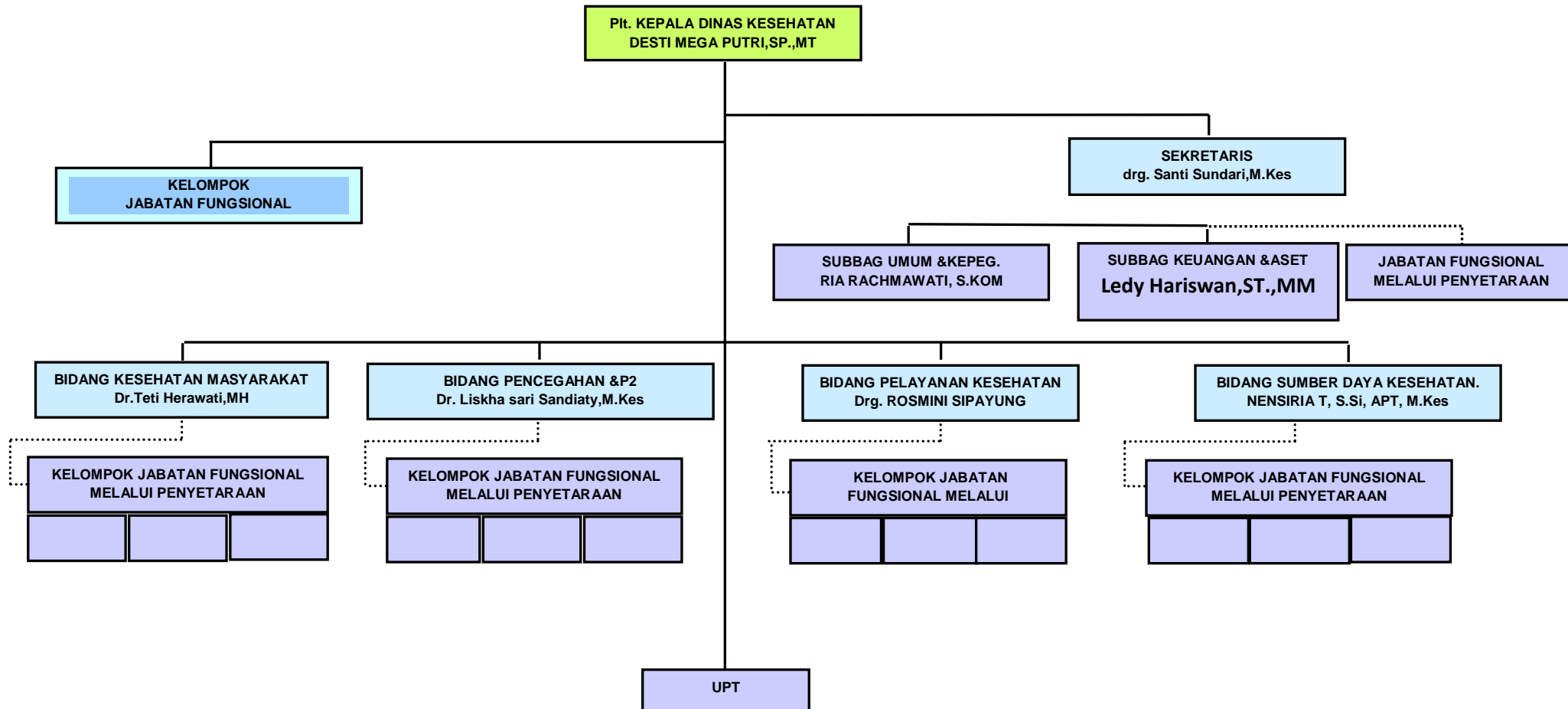
melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas;
2. Bagian Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Jabatan fungsional melalui penyetaraan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG



B. ANALISA ASPEK STRATEGI

Aspek strategi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, aspek – aspek tersebut adalah :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2024, termasuk UPT sebanyak 1.410 orang, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1.297 orang. Sebagian besar merupakan tenaga kesehatan dan terdistribusi di UPT Dinas Kesehatan seperti UPT Puskesmas, UPT Instalasi Farmasi. Kesehatan.

Jumlah PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan berjumlah 1.410 orang yang terdiri dari : sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

1. JUMLAH PNS DI PUSKESMAS : 1.323

1.	Dr. Umum	:	166
2.	Dr. Gigi	:	51
3.	Bidan	:	390
4.	Perawat	:	347
5.	Pranata Laboratorium Kesehatan	:	49
6.	Sanitarian	:	36
7.	Asiten Apoteker	:	13
8.	Apoteker	:	40
9.	Perawat Gigi	:	38
10.	Penyuluh	:	44
11.	Nutrisionis	:	34
12.	Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	:	9
13.	Epidemiologi Kesehatan	:	4
14.	Administrator Kesehatan	:	1
15.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	99

2. JUMLAH PNS DI DINAS KESEHATAN : 78

1.	Epidemiologi Kesehatan	:	1
2.	Administrator Kesehatan	:	5
3.	Perencana	:	1
4.	Analisis Kepegawaian	:	1
5.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	70

3. JUMLAH PNS DI UPT INSTALASI FARMASI : 8

1.	Apoteker	:	1
2.	Asisten Apoteker	:	2
3.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	6

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana berupa Puskesmas dan jaringannya yaitu, Puskesmas Pembantu, Poskeskel, Posyandu dan Puskesmas keliling. Secara rinci jumlah sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas	
	a. Puskesmas Rawat Inap	15
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	16
2	Puskesmas Pembantu	50
3	Posyandu	705
4	Poskeskel	126
5.	Ambulan/Puskesmas keliling	65

Sumber Data : Sub. Program dan Informasi Tahun 2023

3. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.2.
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung T.A 2024

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1.	BELANJA OPERASI	344.842.349.670
2.	BELANJA MODAL	59.440.035.453
	JUMLAH	404.282.385.123

Sumber Data : Sub Bag Program dan Informasi Tahun 2024

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pembangunan di bidang kesehatan dapat diidentifikasi permasalahan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Permasalahan Bidang Kesehatan di Kota
Bandar Lampung T.A 2024

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	1 Kasus kematian ibu, kematian bayi dan balita	1 Adanya kasus preeklamsia, anemi dan penyakit penyerta lainnya pada ibu hamil
		2 Adanya bayi dan balita yang berada di garis merah	2 Permasalahan gizi ibu hamil, bayi dan balita
		3 Permasalahan kasus stunting	
		4. Kasus Kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (TBC, Malaria Diare, DBD, HIV) dan tidak menular (Hipertensi, diabetes, stroke, obesitas) Terutama pada usia produktif dan usia lanjut	3. Kualitas kesehatan lingkungan belum baik 4. Pola hidup masyarakat kurang sehat /tidak melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (merokok,kurang aktifitas fisik,makanan kurang sehat)

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		5. Mutu dan akses pelayanan kesehatan belum maksimal	5. Penempatan tenaga kesehatan yang belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan Belum tercukupinya kebutuhan beberapa jenis tenaga fungsional kesehatan (kesehatan lingkungan, kefarmasian, analisis laboratorium, rekam medik).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat ketika proses pemilihan kepala daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, dokumen RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maupun diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan daerah.

VISI

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan

KEMAKMURAN : yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 di dalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA: Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani kebutuhan distribusi perekonomian dan pengembangan investasi serta kebutuhan sosial masyarakat.

MISI KEEMPAT: Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI KELIMA: Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius, berbasis keluarga dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional..

MISI KEENAM: Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan

sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan yang didukung oleh tingkat keamanan kota terpadu dengan melibatkan kerjasama antara aparaturnya serta partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Waliota Bandar Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijalankan. Penetapan tujuan dan sasaran ini tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang tentunya harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

A. TUJUAN

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai kemudian ditetapkan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

B. SASARAN

Sasaran 1

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat, dengan indikator :

1. Kasus Kematian Ibu (AKI)
2. Kasus Kematian Bayi (AKB)
3. Balita Stunting

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan 1 indikator sasaran yaitu :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna
2. Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas

2.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran program pembangunan bidang kesehatan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan. Rumusan strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. Secara lengkap tujuan, sasaran, rumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode 2021-2026

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.								
Misi 1	: Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan ibu bayi dan balita dengan perbaikan gizi kepada ibu bayi dan balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Status Gizi dan Kesehatan ibu hamil bayi dan balita melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 2. Pemantauan secara rutin Ibu hamil resiko tinggi 3. Pemantauan secara rutin bayi, balita dengan status gizi kurang dan stunting 					
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana terutama peralatan kesehatan, obat dan vaksin di Puskesmas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar Puskesmas melalui akreditasi Puskesmas 2. Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi 3. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 4. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah 5. Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional 					

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 melalui dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.5 berikut ini

Tabel 2.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN"	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PERIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				256.859.246.000			
1.02	KESEHATAN				256.859.246.000			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN	persen	98	166.096.746.000			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	persen	100	25.000.000	APBD		

1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	25.000.000	APBD		
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	persen	100	77.756.000.000	APBD		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1.194	77.540.000.000	APBD		
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	216.000.000	APBD		
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	100	50.000.000	APBD		
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10	50.000.000	APBD		

1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	100	255.500.000	APBD		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	APBD		
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	APBD		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	APBD		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	30.000.000	APBD		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	APBD		
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10	7.500.000	APBD		
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	8.000.000	APBD		

1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	75.000.000	APBD		
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98	280.000.000	APBD		
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1		APBD		
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1		APBD		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	100.000.000	APBD		
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	180.000.000	APBD		
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	persen	100	20.337.500.000	APBD		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	170.000.000	APBD		

1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	20.167.500.000	APBD		
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	100	695.900.000	APBD		
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	30.000.000	APBD		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	455.900.000	APBD		
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	10.000.000	APBD		
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	150.000.000	APBD		
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.000.000	APBD		

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Unit Kerja	31	66.696.846.000	BLUD		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Unit Kerja	31	66.696.846.000	BLUD		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN	angka	2,00	89.292.500.000	APBD		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82,00	16.969.000.000	APBD		
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	Unit	3	8.500.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	189.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	unit	1	3.400.000.000	APBD dan DAK		

	Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	1,00	3.700.000.000	APBD		
1.02.02.2.01.17	pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	1,00	1.000.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	1,00	180.000.000			
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82,00	72.173.500.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19592	500.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18702	300.000.000	APBD dan DAK		

1.02.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	17811	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	86512	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	155442	300.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	754465	350.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	92994	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	200001	300.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	orang	18644	300.000.000	APBD dan DAK		

		Standar						
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1882	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	23474	500.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	28060	300.000.000	APBD		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	750.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	350.000.000	APBD dan DAK		

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	300.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1.851	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1.851	150.000.000	APBD		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	29.500.000.000	APBD dan DAK		

1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kab/kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	18.300.000.000	APBD		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	15.573.500.000	APBD		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	12	1.150.000.000	APBD		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	300.000.000	APBD		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	80	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	70	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	30	250.000.000	APBD dan DAK		

1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	80	150.000.000	APBD		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	100.000.000	APBD		
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	50.000.000	APBD		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	persen	80	300.000.000	APBD		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusi Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82	200.000.000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	50	100.000.000	APBD dan DAK		

1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	100.000.000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82	100.000.000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensiny	orang	200	100.000.000	APBD dan DAK		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar	persen	95	400.000.000	APBD dan DAK		

1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	persen	100	150.000.000	APBD dan DAK		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1	150.000.000	APBD dan DAK		
1.02.04.02.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	persen	80	150.000.000	APBD dan DAK		
1.02.04.02.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Dokumen	1	150.000.000	APBD		

	Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
1.02.04.02.06	Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	persen	100	100.000.000	APBD		
1.02.04.02.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	50	100.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat ber PHBS	persen	75	770.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	74	420.000.000	APBD dan DAK		

1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	420.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	82	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	250.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	82	100.000.000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	100.000.000	APBD dan DAK		
	JUMLAH				256.859.246.000			

2.3 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun rekapitulasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.3. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja merupakan penjabaran target kinerja triwulanan yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. Rencana Aksi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disajikan pada Matriks II.2. dalam Lampiran LKIP

Tabel 2.3 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2024

URUSAN PEMERINTAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	Permasalahan	Upaya Mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	kebijakan strategis
KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN	PERSEN	98,00	98,00				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dinas kesehatan	Dokumen	2,00	2,00	Kinerja tercapai			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kali	182,00	182,00	Kinerja tercapai			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	25,00	25,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	25,00	12,00	sesuai dengan kebutuhan diklat			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	Kinerja tercapai	optimalkan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pencapaian program bidang kesehatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	100,00	100,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	92,00	92,00	Kinerja tercapai			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	15,00	Kinerja tercapai			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	31,00	31,00				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	31,00	31,00		mengoptimalkan fungsi Puskesmas dalam pelayanan menggunakan sumber anggaran yang ada di Puskesmas		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	ANGKA	2,00	2,00				
	ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	KASUS	10,00	4,00				
	PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN)	PERSEN	6,30	4,13				
	TINGKAT PREVALENSI TUBERCULOSIS PER 100.000 PENDUDUK	KASUS	384,00	370,00				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80,00	80,00				
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana,	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
	Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar							
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1,00	1,00		Selain sumber anggaran DAK diperlukan adanya dukungan anggaran APBD		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medik Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1,00	1,00		Selain sumber anggaran DAK diperlukan adanya dukungan anggaran APBD		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1,00	1,00		diperlukan sarana kendaraan untuk distribusi obat		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	84,00	84,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19.592,00	19.592,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.676,00	4.676,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.453,00	4.453,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	86.512,00	86.512,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38.860,50	38.860,50	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	188.616,00	188.616,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
	Kesehatan Sesuai Standar		00					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92.994,00	92.994,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200.001,00	200.001,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18.644,00	18.644,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.882,00	1.882,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23.474,00	23.474,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28.060,00	28.060,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	6,00	6,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1.851,00	1.851,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang	Orang			Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
NAPZA	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1.851,00	1.851,00				
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	3,00	3,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	-	-	di tahun 2024 tidak ada penilaian Kota sehat			
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5,00	5,00		mengoptimalkan fungsi Puskesmas dalam pelayanan menggunakan sumber anggaran yang ada di Puskesmas		
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5,00	5,00		mengoptimalkan peran kader kesehatan dalam mendukung program kesehatan		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	8,00	8,00	Kinerja tercapai			
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	2,00	2,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	80,00	80,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	Orang	70,00	70,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
	kesehatan sesuai standar							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	30,00	30,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	80,00	80,00				
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR	PERSEN	73,00	73,00				
	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	60,00	60,00				
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	80,00	80,00				
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100,00	100,00	Kinerja tercapai			
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	80,00	80,00				
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100,00	100,00	Kinerja tercapai			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN STANDAR	PERSEN	93,00	93,00			
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Persen	100,00	100,00			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5,00	5,00	Kinerja tercapai		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	Persen	80,00	80,00			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	5,00	5,00	Kinerja tercapai		
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	Persen	100,00	100,00			
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	1,00	1,00	Kinerja tercapai		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE MASYARAKAT BER PHBS	PERSEN	75,00	75,00			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	72,00	72,00			

URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya	Tindak Lanjut	kebijakan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5,00	5,00	Kinerja tercapai			
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	Persen	80,00	80,00				
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5,00	5,00	Kinerja tercapai			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	Persen	80,00	80,00				
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1,00	1,00	Kinerja tercapai			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diterapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja dimana tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 telah dimuat dalam bab sebelumnya mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus

sebagai berikut: ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
Capaian Indikator kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100
Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (TAPKIN) tahun 2024.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai indikator sasaran dimaksud Dinas Kesehatan telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 baik bersumber dana dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2024. Secara rinci Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 (Tahun

Sebelumnya) Dan Tahun 2026 (Tahun Terakhir Renstra) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kesehatan IbuDan Anak Serta Status Gizi masyarakat	1.	Kasus Kematian Ibu (AKI)	kasus	10	6	140
		2.	Kasus Kematian Bayi (AKB)	kasus	60	84	48,33
		3.	Kasus Balita Stunting	persen	14	0,5	275
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan kesehatan	1.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	persen	71	71	100
		2.	Survey Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas	persen	100	100	100

3.2.1 Capaian Kinerja Strategis Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Dan Target Renstra

TABEL 3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DENGAN TAHUN 2023 (TAHUN SEBELUMNYA) DAN TAHUN 2026 (TAHUN TERAKHIR RENSTRA)

No	MISI/ SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2024	Target dan Capaian Tahun 2024			Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2024 dengan Tahun 2023			Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2024 dengan Tahun 2026				
							Realisasi	Capaian	Realisasi	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian			
															%	2023	2024
1	MISI 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat		Usia Harapan Hidup (AHH)	absolut	72,06	72,24	100,24		71,91	72,24	100,45		72,24	72,23	100,01	
	Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat SASARAN 1	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat		Kasus Kematian Ibu (AKI)	kasus	10	6	140		5	6	80		6	10	140	
					Kasus Kematian Bayi (AKB)	kasus	60	84	60		91	84	107		84	60	60
					Balita Stunting	persen	4,3	0,5	188		4,3	0,5	188		0,5	3,8	158
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	persen	71	71	100		30	71	236		71	100	71
					Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	Persen	100	100	100		100	100	100		100	100	100

TABEL ANALISA PER SASARAN STRATEGIS

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat
IKU : Kasus Kematian Ibu (AKI)

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2024	140 %	Kondisi Maternal tergambar dari besarnya kasus Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu melahirkan menurun tajam menjadi 4 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian ibu sebanyak 5 kasus. Perbandingan antara realisasi di tahun 2023 sebanyak 5 kasus dari target sebanyak 10 Kasus, sehingga capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 140%. Capaian Kinerja 140%. Di tahun 2024 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 6 kasus namun masih dibawah target 10 kasus, capaian kinerja sebesar 140%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kasus kematian Ibu di Kota Bandar Lampung masih dapat dikendalikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023	80%	Bila dibandingkan realisasi capaian Kasus Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 sebanyak 6 kasus dengan Tahun 2023 sebesar 5 kasus mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus dengan capaian kinerja 80%. Kinerja dibawah 100% menunjukkan bahwa belum berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pengendalian kasus kematian ibu. Banyak penyebab terjadinya peningkatan Kasus kematian ibu ini. Keterlambatan pasien ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan persalinan padahal sejak kehamilan ibu sudah dalam kondisi resiko tinggi kehamilan.

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
			Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilannya pada dokter spesialis sehingga tidak terpantau dan tercatat kondisi kehamilannya pada Puskesmas yang sebenarnya kondisi ibu hamil tersebut mengalami resiko tinggi kehamilan yang perlu mendapatkan monitoring secara ketat.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (2026)	140 %	Bila dibandingkan realisasi Kasus Kematian Ibu (AKI) 2024 sebesar 6 kasus dengan Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026) sebesar 10 kasus maka didapat capaian kinerja sebesar 140% (capaian diatas 100%). Capaian Kinerja 150% ini dapat diinterpretasikan bahwa kasus kematian Ibu di Kota Bandar Lampung dapat dikendalikan dengan baik karena realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan . Diharapkan sampai dengan akhir RENSTRA realisasi kasus Kematian Ibu (AKI) dapat dikendalikan tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta penyesuaian terhadap kebijakan baru akan penting untuk mencapai target akhir RENSTRA 2021-2026.
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya keterlambatan pasien ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan persalinan. Sejak kehamilan ibu sudah dalam kondisi resiko tinggi kehamilan. Dukungan petugas dan kerjasama dengan dokter spesialis kandungan dalam upaya memberikan pemahaman kepada ibu hamil terkait resiko kehamilan dan persalinan yang bisa terjadi merupakan faktor keberhasilan pencapaian kinerja.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat
IKU : Kasus Kematian Bayi (AKB)

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2024	60%	<p>Pada tahun 2020 Kasus kematian bayi di Kota Bandar Lampung berjumlah 34. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 60 kasus. Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi kembali meningkat menjadi 69 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi sebanyak 91 kasus. Jika dibandingkan antara realisasi dan target dihasilkan capaian kinerja 48,33%. Untuk tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi sebesar 84 kasus dari target 60. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 kasus kematian bayi menurun, namun jumlah kasus masih di atas target yang ditetapkan sebesar 60 kasus dengan capaian kinerja 60%. Kondisi ini menggambarkan kinerja belum maksimal. Capaian kinerja di tahun berikutnya diharapkan bisa mencapai 100 % dengan jumlah kasus dibawah target. Penyebab kematian ini sebagian disebabkan karena berat bayi lahir rendah (BBLR), selebihnya dikarenakan asfiksia (gangguan nafas), kelainan bawaan dan penyakit infeksi. Kondisi kesehatan ibu saat kehamilan sangat menentukan kesehatan bayinya pada saat dilahirkan, untuk itu berbagai upaya diarahkan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil resiko tinggi (kekurangan energi protein kronis/KEK)</p>
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023	107%	<p>Bila dibandingkan realisasi Kasus Kematian bayi (AKB) Tahun 2023 sebanyak 91 kasus, Tahun 2024 realisasi kasus sebanyak 84. Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 107%. Capaian kinerja diatas 100% ini menunjukkan upaya menurunkan kasus kematian bayi telah berhasil dilakukan. Kondisi kesehatan ibu saat kehamilan sangat menentukan kesehatan bayinya pada saat dilahirkan. Masih adanya kondisi ibu hamil dengan resiko tinggi pada saat</p>

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
			kehamilan seperti kekurangan energi protein kronis/KEK). untuk itu berbagai upaya diarahkan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dengan resiko tinggi diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT). Monitoring secara ketat ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas petugas kesehatan dalam penanganan persalinan terutama pada ibu hamil resiko tinggi.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (2026)	60%	Bila dibandingkan realisasi Kasus Kematian bayi (AKB) 2024 sebesar 84 kasus dengan Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026) sebesar 60 kasus maka didapat capaian kinerja sebesar 60%. Capaian kinerja masih di bawah 100% ini menunjukkan upaya menurunkan kasus kematian bayi belum berhasil dilakukan. Upaya terus dilakukan untuk menurunkan kasus kematian ibu tidak melebihi target di akhir RENSTRA. Diharapkan sampai dengan akhir RENSTRA jumlah kasus Kematian bayi ini dapat dikendalikan tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta penyesuaian terhadap kebijakan baru akan penting untuk mencapai target akhir RENSTRA 2021-2026.
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya keterlambatan pasien ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan persalinan. Sejak kehamilan ibu sudah dalam kondisi resiko tinggi kehamilan. Dukungan petugas dan kerjasama dengan dokter spesialis kandungan dalam upaya memberikan pemahaman kepada ibu hamil terkait resiko kehamilan dan persalinan yang bisa terjadi merupakan faktor keberhasilan pencapaian kinerja.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat
IKU : Balita Stunting

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2024	188 %	Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek dari pada standar usianya. Pada Tahun 2024 jumlah stunting di Kota Bandar Lampung berdasarkan operasi timbang 0,5% dengan target 4,3%, capaian kinerja 188%. Capaian kinerja yang baik diatas 100% menunjukkan upaya keberhasilan dalam pengendalian kasus balita stunting di Kota Bandar Lampung.
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023	188%	Bila dibandingkan realisasi balita stunting di Tahun 2024 sebesar 0,5% dengan realisasi kasus balita stunting di Tahun 2023 sebesar 5,6 %. Realisasi kasus mengalami penurunan signifikan. Data ini diperoleh dari hasil operasi timbang yang dilakukan oleh dinas kesehatan setiap tahunnya. dengan capaian kinerja sebesar 188% (didas100%). Kondisi capaian kinerja diatas% ini perlu dipertahankan untuk dilakukan upaya-upaya agar stunting dapat dikendalikan. Kondisi sebelum kehamilan (masa remaja) dan 1.000 hari pertama kelahiran menjadi fokus pengendalian kasus balita stunting ini.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (2026)	66%	Bila dibandingkan realisasi stunting sebesar 0,5% dengan Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026) sebesar 3,8%. Kondisi capaian kinerja ini tetap dikendalikan untuk dilakukan upaya-upaya penegndalian hingga akhir RENSTRA 2026. Kondisi sebelum kehamilan (masa remaja) dan 1.000 hari pertama kelahiran menjadi fokus pengendalian kasus balita stunting ini.

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Kondisi sosial budaya, ekonomi faktor kesehatan tempat tinggal, pemahaman masyarakat terhadap stunting ini menjadi faktor kendala dalam keberhasilan pengendalian kasus stunting. Dukungan dan kerjasama stakeholder/pemangku kepentingan melalui tim percepatan penurunan stunting menjadi faktor keberhasilan kedepan dalam upaya penurunan kasus stunting.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
IKU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2024	100%	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengakuan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Proses akreditasi ini dievaluasi setiap 3 tahun sekali untuk menjamin kualitas pelayanannya. Pada tahun 2024 di targetkan 71% (22 Puskesmas) fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna, realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 100%. Meskipun target tercapai namun tetap diupayakan di tahun berikutnya akreditasi 31 Puskesmas suadh terakreditasi paripurna. Perbaikan sarana, prasarana sumber daya manusia, pencatatan pelaporan dan aspek lain untuk proses penilaian akreditasi.

2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023	236%	Pelaksanaan re akreditasi (akreditasi ulang) dilakukan setiap 3 tahun sekali, setelah tahun 2020 dilaksanakan registrasi ulang (reakreditasi), reakreditasi berikutnya dilaksanakan di tahun 2023. Pada tahun 2023 tersebut belum 31 Puskesmas dapat dilakukan proses akreditasi karena kondisi bangunan Puskesmas yang masih dalam pembangunan. Alreditasidilakukan pada tahun 2024. Jadi bila dibandingkan dengan tahun 2023 maka capaian kinerja untuk Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi paripurna sebesar 236% karena di tahun 2023 jumlah untuk Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi paripurna baru mencapai 30%.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (2026)	71%	Capain kinerja untuk indikator fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Tahun RENSTRA 2026 sebesar 71% fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna. Kondisi ini akan ditingkatkan sehingga, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta penyesuaian terhadap kebijakan baru akan penting untuk mencapai target akhir RENSTRA 2021-2026 sebanyak 100% (31 Puskesmas).
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Kondisi sarana prasarana, SDM, pencatatan pelaporan yang masih belum sesuai standar perlu mendapat perhatian perbaikan. Karena akreditasi ini merupakan standar persyaratan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang baru dipahami oleh sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya peraturan yang mengikat dari Pemerintah Pusat tentang standar mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai syarat dalam proses perizinan.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
IKU : Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2024	100%	<p>Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Survei kepuasan seharusnya dilaksanakan sekali setahun oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai informasi dasar untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan. Survei kepuasan diatur secara teknis pelaksanaan survei tersebut ke dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 16/2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Permenpan-RB No. 16/2014 kemudian disempurnakan melalui Permenpan-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Realisasi Survei Kepuasan Masyarakat menggambarkan berapa banyak Puskesmas yang mendapatkan penilaian BAIK (nilai 76,61-88,30) di tahun 2023. Dari 31 Puskesmas yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2023, rata-rata mendapatkan nilai BAIK (100%), hal ini menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, capaian kinerja 100%. Hal ini berkorelasi dengan kondisi 31 Puskesmas telah melaksanakan proses akreditasi di tahun 2016.</p>
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023	100%	<p>Jika dibandingkan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2024 dan tahun 2023, capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kepada masyarakat. Apabila ada sebagian kecil masyarakat yang memang belum puas dalam pelayanan kesehatan, hal ini situasional yang tetap menjadi perhatian untuk perbaikan di kemudian hari.</p>
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra (2026)	100%	<p>Sampai dengan tahun 2026 (RENSTRA) Dinas Kesehatan menetapkan target 100% seluruh Puskesmas yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai BAIK, sehingga target capaian kinerja tetap dapat dipertahankan 100% (31 Puskesmas) mempunyai kinerja BAIK. Meskipun dalam realisasi di tahun 2023 ada beberapa Puskesmas yang mendapatkan Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat SANGAT BAIK. Evaluasi,</p>

			monitoring serta penyesuaian terhadap kebijakan baru akan penting untuk mencapai target akhir RENSTRA 2021-2026.
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Kondisi 31 Puskesmas yang sampai tahun 2024 ini telah terakreditasi, bahkan dari 31 Puskesmas sebanyak 22 Puskesmas terakreditasi PARIPURNA. Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat puas dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pelayanan sudah sesuai dengan standar mutu kualitas pelayanan kesehatan.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Nasional

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara Nasional terdapat 12 (dua belas) indikator wajib yang menjadi tolok ukur kinerja bidang kesehatan dengan target masing-masing indikator sebesar 100 persen. Berikut disajikan pencapaian target SPM bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024 dibandingkan dengan target nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan SPM Tahun 2022-2024 dengan Target Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	Target Nasional	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	95,17 %	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	95,76%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang merupakan target nasional di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami perbaikan hingga di tahun 2024 12 indikator yang menjadi tolok ukur telah mencapai hasil 100 persen sesuai dengan target nasional. Hal ini tentunya karena berbagai upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dinas kesehatan dengan dukungan sumber daya anggaran yang belum maksimal. Untuk itu diharapkan pada tahun berikutnya dukungan sumber daya terutama anggaran untuk mencapai target.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun 2024 Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dikehendaki dalam rencana strategis sebagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.525.280.759	175.342.734.428	78,80	212.444.302.032	174.672.734.428	82,22	676.018.927	670.000.000	0
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.748	12.560.000	50,24	24.999.748	12.560.000	50,24	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.748	12.560.000	50,24	24.999.748	12.560.000	50,24	-	-	0
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.840.092.619	97.462.502.009	87,93	112.110.092.619	97.462.502.009	86,93	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110.607.198.719	97.320.128.009,00	87,99	111.907.198.719	97.320.128.009	86,97	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	232.893.900	142.374.000	61,13	202.893.900	142.374.000	70,17	-	-	0
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	9.600.000	19,20	50.000.000	9.600.000	19,20			
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawaiian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	9.600.000	19,20	50.000.000	9.600.000	19,20			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.555.518	305.813.921	69,89	437.555.518	305.813.921	69,89	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	29.994.779	19.533.850	65,12	29.994.779	19.533.850	65,12	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000	72.013.271	96,02	75.000.000	72.013.271	96,02	-	-	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.060.763	8.067.150,00	47,28	17.060.763	8.067.150	47,28	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	45.292.500	90,59	50.000.000	45.292.500	90,59	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.499.976	63.280.196,00	81,65	77.499.976	63.280.196	81,65	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.600.000	96,00	10.000.000	9.600.000	96,00	-	-	0
Sub Kegiatan :	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	25.497.000	91,06	28.000.000	25.497.000	91,06	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	62.529.954	41,69	150.000.000	62.529.954	41,69	-	-	0
Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.018.927	670.000.000	99,11	-	-	-	676.018.927	670.000.000	0
Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000	547.000.000	99,45				550.000.000	547.000.000	0
Sub Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.018.927	123.000.000	97,60				126.018.927	123.000.000	0
Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.032.100.000	16.219.117.812	95,23	20.262.100.000	16.219.117.812	80,05	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000	167.542.812	82,13	204.000.000	167.542.812	82,13	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.828.100.000	16.051.575.000,00	95,39	20.058.100.000	16.051.575.000	80,03	-	-	0
Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	832.708.147	575.305.571	69,09	862.708.147	575.305.571	66,69	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.430.000	-	0,00	47.430.000	-	0,00	-	-	0
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.336.802	259.861.775	55,60	497.336.802	259.861.775	52,25	-	-	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.420.000	97,10	20.000.000	19.420.000	97,10	-		0
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.218.545	180.798.796	99,77	248.053.745	180.798.796	72,89	-		0
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.722.800	115.225.000	98,72	49.887.600	115.225.000	230,97	-		0
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	92.631.805.800	60.087.835.115	64,87	78.696.846.000	60.087.835.115	76,35	-		0
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	92.631.805.800	60.087.835.114,72	64,87	78.696.846.000	60.087.835.115	76,35	-	-	0
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	178.479.700.831	142.822.081.715	80,02	129.195.644.105	133.214.183.215	103,11	9.612.798.500	9.607.898.500	
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	19.118.313.622	19.012.457.305	99,45	9.505.515.122	9.404.558.805	98,94	9.612.798.500	9.607.898.500	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.333.113.500	1.333.113.500	100,00				1.333.113.500	1.333.113.500	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.279.685.000	8.274.785.000	99,94			0,00	8.279.685.000	8.274.785.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.165.729.486	9.165.590.805	100,00	9.165.729.486	9.165.590.805	0,00	-		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	179.786.200	102.180.000	56,83	179.786.200	102.180.000	0,00	-		
	Sub Kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),	159.999.436	136.788.000	85,49	159.999.436	136.788.000	0,00	-		
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.069.388.044	123.590.682.210	77,70	119.398.129.818	123.590.682.210	103,51	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.038.870.000	993.845.000,00	95,67	1.038.870.000	993.845.000	95,67	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	991.300.000	884.890.000,00	89,27	991.300.000	884.890.000	89,27	-	-	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	372.000.000	207.666.000,00	55,82	372.000.000	207.666.000				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	142.499.863	75.429.300	52,93	142.499.863	75.429.300	52,93	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.064.500.000	988.194.500,00	92,83	1.064.500.000	988.194.500	92,83			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	183.279.746	180.639.250,00	98,56	183.279.746	180.639.250	98,56	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.000.000	138.916.000	92,61	150.000.000	138.916.000		-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.999.887	99.082.500	99,08	99.999.887	99.082.500	99,08	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	1.812.506.060	1.811.465.000	99,94	1.812.506.060	1.811.465.000	99,94	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	149.999.584	61.972.500	41,32	149.999.584	61.972.500		-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.502.760.000	3.435.253.500,00	98,07	3.502.760.000	3.435.253.500	98,07	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	407.300.000	374.084.000,00	91,84	407.300.000	374.084.000	91,84	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	963.018.500	809.184.500,00	84,03	963.018.500	809.184.500	84,03	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.966.517.000	5.967.508.019,00	74,91	7.966.517.000	5.967.508.019	74,91	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	99.999.707	68.085.000	68,09	99.999.707	68.085.000				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	908.475.000	900.075.000,00	99,08	908.475.000	900.075.000	99,08	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	823.644.600	630.300.600,00	76,53	823.644.600	630.300.600	76,53	-	-	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.552.379.097	1.311.289.000,00	84,47	1.552.379.097	1.311.289.000	84,47	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	132.639.957	131.470.200	99,12	132.639.957	131.470.200	99,12	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	68.660.000	59.660.000	86,89	68.660.000	59.660.000				
0	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.774.306.209	6.898.691.222,00	88,74	7.774.306.209	6.898.691.222	88,74	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98.577.099.604	73.262.213.153	74,32	98.577.099.694	73.262.213.153	74,32	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	90.200.000	27.976.000		90.200.000	27.976.000				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	99.999.835	-		99.999.835	-				
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas	6.011.467.000	5.845.243.204,00	97,23	6.011.467.000	5.845.243.204	97,23	-	-	0
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.538.187.650	14.543.648.377,00	74,44	29.091.937.650	14.543.648.377	49,99	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	91.018.419	83.617.500	91,87	91.018.419	83.617.500	91,87	-	-	0
	Sub Kegiatan : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	116.900.000	116.700.000,00		116.900.000	116.700.000		-	-	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	308.797.302	307.492.500	99,58	308.797.302	307.492.500	99,58	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	464.940.000	351.715.000,00	75,65	464.940.000	351.715.000	75,65	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	195.700.000	144.150.000,00	73,66	195.700.000	144.150.000	73,66	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	84.913.024	76.589.534	90,20	84.913.024	76.589.534	90,20	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	951.500.000	827.949.351,00		951.500.000	827.949.351		-	-	0

Sub Kegiatan :	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.334.010.000	1.975.686.500,00		2.334.010.000	1.975.686.500		-	-	0
----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	---------------	--	---	---	---

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	291.999.165	218.942.200	74,98	291.999.165	218.942.200	74,98	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	291.999.165	218.942.200,00	74,98	291.999.165	218.942.200	74,98	-	-	0
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.847.623.761	1.489.875.390	80,64	1.847.623.761	1.489.875.390	80,64	-	-	0
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	336.754.820	251.603.750	74,71	336.754.820	251.603.750	74,71	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	99.999.820	71.431.750		99.999.820	71.431.750				
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	236.755.000	180.172.000	76,10	236.755.000	180.172.000	76,10	-	-	0
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	1.510.868.941	1.238.271.640	81,96	1.510.868.941	1.238.271.640	81,96	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.510.868.941	1.238.271.640	81,96	1.510.868.941	1.238.271.640	81,96	-	-	0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	351.763.000	340.343.600	96,75	351.763.000	340.343.600	96,75	-	-	0
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	63.730.000	63.235.000	0,00	63.730.000	63.235.000	0,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	63.235.000,00	0,00	63.730.000	63.235.000	0,00	-	-	0
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	184.214.000	173.304.800	94,08	184.214.000	173.304.800	94,08	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut	184.214.000	173.304.800	94,08	184.214.000	173.304.800	94,08	-	-	0

	pengawasan									
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan : Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	103.819.000	103.803.800	99,99	103.819.000	103.803.800	99,99	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	103.819.000	103.803.800	99,99	103.819.000	103.803.800	99,99	-	-	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.078.016.772	961.120.000	89,16	1.003.016.772	961.120.000	95,82	-	-	0
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	576.499.918	573.570.000	99,49	501.499.918	573.570.000	114,37	-	-	0
	Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	576.499.918	573.570.000	99,49	501.499.918	573.570.000	114,37	-	-	0
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	97.650.000	97,65	100.000.000	97.650.000	97,65	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	100.000.000	97.650.000	97,65	100.000.000	97.650.000	97,65	-	-	0
	Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	401.516.854	289.900.000	72,20	401.516.854	289.900.000	72,20	-	-	0
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	401.516.854	289.900.000,00	72,20	401.516.854	289.900.000	72,20	-	-	0

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah Belanja Operasi					344.842.349.670		90,09			
Jumlah Belanja Modal								10.288.817.427	10.277.898.500	99,89
Jumlah Belanja Tidak Terduga										
Jumlah Belanja Transfer										
Total		404.282.385.123.	320.956.155.132,72	79,39	344.842.349.670	310.678.256.632,72	90,09	10.288.817.427	10.277.898.500	99,89

Berdasarkan tabel 3.4realisasi anggaran Dinas kesehatan Tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.131.167.079dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 294.219.695.984(82,85%). Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 19 kegiatan dan 71 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Realisasi Anggaran sebesar 82,85% tersebut selain dipergunakan untuk pembiayaan operasional dan belanja alat, juga di gunakan dalam rangka pembayaran hutang anggaran kegiatan yang telah di laksanakan Tahun 2023.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 sub kegiatan. Program ini merupakan program pendukung bagi terselenggaranya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan.

II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 178.479.700.831 Output kinerja dari program ini antara lain :

- a. angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar **6 kasus,**
- b. prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar **0,50 persen,**
- c. tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak **384 kasus**
- d. cakupan pelayanan BLUD Realisasi anggaran sebesar **Rp.44.878.164.161(57,03 %).**

Uraian Program ini terdiri dari kegiatan kegiatan sbb :

2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 19.118.313.622. Pada akhir Tahun 2024, alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 19.012.457.305 atau sebesar 99,51 % dengan perincian persub Kegiatan sbb :

1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.333.113.500 yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Alokasi anggaran tersebut pada akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.333.113.500 atau 100 %.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan lanjutan Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung (Retensi gedung IFK) dan juga untuk pembayaran kegiatan Tahun 2023. Saat ini Bangunan IFK Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah dapat digunakan sesuai fungsinya.

2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 8.279.685.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2024. Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.274.785.000 atau tercapai sebesar 99,84 %.

Pelaksanaan kegiatan sub kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan Puskesmas Keliling roda dua dan Puskesmas Keliling Roda empat bagi UPT. Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Selain itu juga pengadaan Vaksin refrigerator, temperature logger, Sanitarian Kit dan freezer untuk penyimpanan vaksin. Output

kinerjakegiatan adalah peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tersedianya peralatan penunjang yang memadai.

3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan Minuman di Fasiulitas Kesehatan

Pada Sub kegiatan ini ini terdapat dukungan anggaran sebesar Rp. 9.165.729.486 yang berasal dari DAK Bidang Kesehatan. Pada akhir Tahun 2024 realisasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 9.165.590.805 atau 100 %.

Alokasi dana anggaran dipergunakan untuk pengadaan Obat, BMHP serta vaksin di UPT Instalasi Farmasi Kesehatan dan telah didistribusikan ke UPT. Selain itu anggaran sebesar Rp. 168.736.000 dari total anggaran dialokasikan untuk pembayaran Hutang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

4. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik di Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 179.786.200 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 102.180.000 atau sebesar 56,83 %.

Penggunaan alokasi anggaran adalah untuk pemeliharaan alkes dan alat penunjang medik berupa kalibrasi alat dan pemeliharaan rutin. Penyerapan anggaran tidak mencapai 100 % karena ketersediaan alat yang dapat dilakukan kalibrasi dan pemeliharaan sudah tertentu jumlahnya.

5. Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Dukungan anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 159.999.436 dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 136.788.000 atau sebesar 85,49 %.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk distribusi Alkes, Obat, Vaksin dan BMHP dari UPT. Instalasi Farmasi Kesehatan ke UPT Puskesmas di seluruh kota Bandar Lampung.

2.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 34 Sub kegiatan dengan dukungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 159.069.388.044 Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp. 123.590.628.210 atau sebesar 77,70 %. Perincian sub kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan adalah sbb :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.038.870.000. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan dan seluruh UPT Puskesmas antara lain :

- Pendataan sasaran
- Skrining ibu hamil
- Pemberian bantuan makanan tambahan untuk Ibu hamil beresiko tinggi
- Pelaksanaan Kelas hamil
- Penyuluhan Kesehatan reproduksi
- Kunjungan rumah
- Pengadaan buku KIA, dll

Realisasi anggaran sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp. 993.845.000 atau sebesar 95,66 %.

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sub Kegiatan ini memperoleh dukungan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 991.300.000 dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 884.890.000 atau sebesar 89,26 %.

Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan di Dinas Kesehatan dan di seluruh UPT Puskesmas di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas
- Pertemuan penguatan program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
- Pelayanan Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir antara lain yaitu Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK) bagi bayi baru lahir di sarana Fasilitas Kesehatan. Skrining juga di lakukan di Fasilitas Kesehatan Praktek Bidan Mandiri/Swasta.

Pada Tahun 2024 sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 372.000.000 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi Rp. 207.666.000 atau sebesar 55,82 %

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Sub kegiatan ini memperoleh alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 142.499.863 dan telah terealisasi sebesar Rp. 75.429.300 atau 52,93 %. Pelayanan Kesehatan balita yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain :

- Pencetakan Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
- Pencetakan Modul Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
- Sosialisasi Modul

- Monitoring dan Evaluasi

5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Bentuk kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar antara lain

- Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala murid SD, SMP dan SMA/SMK di Puskesmas
- Kegiatan Aksi Bergizi
 - Pencetakan Buku Raport Kesehatan ku untuk murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Pada Tahun Anggaran 2024, sub kegiatan ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.064.500.000 dan terealisasi Rp. 988.194.500 atau sebesar 92,83 %.

6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pada Tahun Anggaran 2024, pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 183.279.746 dan terealisasi sebesar 98,55 % atau sebesar Rp. 180.639.250. Alokasi anggaran sub kegiatan ini selain digunakan untuk pembiayaan kegiatan tahun 2024 juga digunakan untuk pembayaran hutang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Output kinerja yang akan dicapai adalah deteksi dini/skrining Kesehatan penyakit tidak menular prioritas pada usia produktif. Pelayanan Kesehatan usia produktif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan di UPT. Puskesmas terhadap 794.514 orang selama tahun 2024. Kegiatan lain yang dilaksanakan berupa :

- Validasi data
- Supervisi dan Bimbingan teknis program
- Sosialiasi dan pertemuan peningkatan program

- Skrining / Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Prioritas (Kanker serviks dan Pemeriksaan IVA)
- Pencetakan Media KIE (Leaflet dan Banner)
- Pengadaan BMHP skrining kesehatan

7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Upaya pelayanan Kesehatan pada usia lanjut antara lain :

- Skrining Kesehatan pada usia lanjut di Puskesmas
- Pelaksanaan Posyandu Lansia
- Orientasi Kader Lansia
- Pencetakan Buku Lansia
- Sosialisasi dan Penyuluhan

Pada Tahun anggaran 2024, sub kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000 dan pada akhir tahun anggaran terealisasi Rp. 138.916.000 atau sebesar 92,61 %.

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi

Dukungan anggaran utk sub kegiatan ini adalah Rp. 99.999.887 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.082.500 atau tercapai 99,08 %.

Output kinerja yang ingin dicapai adalah Pelayanan Kesehatan yang optimal pada penderita hipertensi di Fasilitas pelayanan Kesehatan, penerapan Kawasan tanpa rokok di sekolah dan Kawasan perkantoran, serta skrining penyakit hipertensi

Upaya Upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pembentukan Satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok
- Monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- Pengadaan reagen untuk pemeriksaan profilipid dan BMHP pemeriksaan EKG

- Sosialisasi dan pertemuan lintas sektor

9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus

Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mendapat dukungan pembiayaan dari dana DAK Non Fisik kementerian Kesehatan sebesar Rp. 1.812.506.060. Output kinerja yang akan dicapai adalah Pemeriksaan Kesehatan / skrining DM pada usia >15 tahun dan pelayanan pada penderita DM secara optimal. Dengan Upaya pemeriksaan secara dini, diharapkan dapat dilakukan pencegahan dan mengurangi resiko Masyarakat terhadap penyakit Diabetes Melitus. Pada akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp. 1.811.465.000 atau sebesar 99,94 %.

Upaya Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

- Pengadaan alat dan BMHP Pemeriksaan Gula darah
- Sosialisasi program dan Penyuluhan
- Skrining Kesehatan terhadap 700.694 orang
- Pemeriksaan gula darah terhadap 20.437 orang
- Supervisi dan bimbingan teknis program

10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 149.999.548 dan terealisasi sebesar Rp. 61.972.500 atau 41,32 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pengadaan Media Penyuluhan Kesehatan Jiwa

- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program
- Pendampingan skrining Kesehatan Jiwa
- Pelayanan Konseling dan Pengobatan

11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis

Sub Kegiatan ini pada Anggaran Tahun 2024 mendapat alokasi dana Rp. 3.502.760.000. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh UPT. Puskesmas di wilayah kerja dinas Kesehatan kota Bandar Lampung antara lain :

- Pengadaan Catridge Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk pemeriksaan terduga Tuberkulosis
- Deteksi dini penderita Tuberkulosis
- Pemeriksaan penderita dan keluarga penderita Tuberkulosis
- Pengawasan minum obat penderita Tuberkulosis
- Penyuluhan
- Supervisi dan Bimbingan teknis program

Pada akhir tahun anggaran 2024, realisasi anggaran tercapai Rp. 3.435.253.500 atau 98,07 %.

12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Dukungan Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar Rp. 407.300.000 . Dan pada akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp. 374.084.000 atau 91,84 %. Menggunakan dana kegiatan antara lain untuk Pengadaan Aalat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pemeriksaan orang terduga terinfeksi HIV, Pemeriksaan dan Pelayanan kesehatan lainnya.

13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana

Dukungan Anggaran sub kegiatan adalah Rp. 963.018.500 dan Realisasi Anggaran Rp. 809.184.500 atau 84,03 %. Realisasi anggaran juga termasuk realisasi pembayaran hutang sub kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana pada Tahun 2023

Penggunaan anggaran sub kegiatan ini antara lain :

- Pembelian BBM Ambulan Gratis dan Ambulan Jenazah
- Penggantian Suku cadang Mobil Ambulan
- Pengadaan tabung oksigen dan pengisian ulang tabung
- Biaya servise mobil ambulan
- Honor supir ambulan

14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran sub kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat berasal dari APBD Kota Bandar Lampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kementerian kesehatan TA. 2024. Jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 7.966.517.000 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi Realisasi Rp. 5.967.508.019 atau 74,91 %.

Alokasi anggaran adalah untuk kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan di UPT. Puskesmas di wilayah kerja Dinkes Kota Bandar Lampung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pelatihan Gizi Bencana
- Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader
- Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak
- Pemberian Makanan Tambahan

- Supervisi dan Bimbingan Teknis

15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Output sub kegiatan pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga adalah Peningkatan dan pemeliharaan derajat Kesehatan fisik, mental dan sosial bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Selain itu bertujuan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan kondisi pekerjaan, mengurangi resiko akibat faktor Kesehatan dan keselamatan kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Pada Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi Anggaran Rp. 99.999.707. Pada akhir Tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 68.085.000 atau 68,09 %

16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas KISATANA Kota Bandar Lampung beserta UPT. Puskesmas di wilayah kerja Dinkes Kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan biologi. Total alokasi Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp, 908.475.000 dan terealisasi sebesar Rp. 900.075.000 atau 99,07 %

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pengadaan reagen pemeriksaan Kualitas air
- Pemeriksaan Kualitas Air Minum
- Inspeksi sarana Sanitasi Dasar (Sarana Jamban Keluarga, Sarana Air Minum, Sarana Pembuangan Air Limbah dan Sarana Pembuangan Sampah)
- Penyuluhan kesehatan lingkungan

- Supervisi dan bimbingan teknis program

17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Pelayanan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPT. Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Kegiatan promosi Kesehatan menitik beratkan pada Upaya promotif dan preventif dengan berbagai kegiatan antara lain :

- Upaya Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan
- Penggerakan kegiatan aksi Bergizi
- Jambore Kader kesehatan
- Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posyandu, Desa Siaga, Saka Bhakti Husada)
- Pengadaan Media Penyuluhan
- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program
- Pertemuan koordinasi lintas sektor

Dukungan Anggaran sub kegiatan ini pada Tahun 2024 sebesar Rp. 823.644.600 dan pada Akhir Tahun 2024 terealisasi Rp. 630.300.600

18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Alokasi Anggaran sub kegiatan Surveilans di dinas Kesehatan kota Bandar Lampung sebesar Rp. 1.552.379.097. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran tersebut antara lainb :

- Verifikasi sinyal penyakit potensial wabah
- Pelacakan kasus penyakit menular khusus

- Pertemuan lintas sektor
- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program
- Surveilans dan pelacakan kasus penyakit potensial wabah di Puskesmas

Pada akhir tahun anggaran 2024, telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.311.289.000 atau 84,47 %

19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Sub Kegiatan ini pada Tahun 2024 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 132.639.975 dan terealisasi sebesar Rp. 131.470.200 atau 99,12 %. Realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan :

- Refreshing kader Kesehatan Jiwa
- Pengadaan Media Penyuluhan Kesehatan Jiwa

Selain itu, realisasi anggaran juga dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Tahun 2023

20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza

Output sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza adalah pencegahan secara dini gangguan Kesehatan jiwa dan penggunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di kalangan Masyarakat kota Bandar Lampung. Dukungan anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.660.000 dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.660.000 atau 86,89 %, Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini anantara lain :

- Pertemuan orientasi promotive dan preventif Kesehatan jiwa bagi tenaga Kesehatan di Puskesmas
- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program
- Pelayanan Konseling di Puskesmas

Selain itu, realisasi anggaran Tahun 2024 ini juga dipergunakan untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2023

21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Alokasi Anggaran sub kegiatan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.774.306.209. Upaya Upaya yang dilaksanakan antara lain :

- Pengadaan alat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pemeriksaan SHK
- Pengadaan BMHP pemeriksaan IVA Test
- Pengadaan alat pemeriksaan Profil lipid
- Pengadaan BMHP alat EKG
- Biaya pemeriksaan sampel SHK dan IVA Test
- Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor
- Supervisi dan bimbingan teknis program

Pada Akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.898.691.222 atau 88,74 %

22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Melalui mprogram ini, masyarakat yang memiliki KTP Elektronik Kota Bandar Lampung dapat memperoleh pembiayaan pengobatan secara gratis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah dan dilakukan secara berjenjang. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan jaminan Kesehatan ini apabila melakukan pengobatan secara berjenjang dari Puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Tipe C dan selanjutnya ke Rumah Sakit Tipe B dan ke Rumah Sakit Tipe A. Tujuan pelayanan ini adalah agar seluruh Masyarakat yang tidak mampu di Kota

Bandar Lampung bisa meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

Untuk Tahun anggaran 2024, alokasi dana yang diperoleh adalah sebesar Rp. 98.577.099.604 Dan pada akhir Tahun 2024, realiasi anggaran program ini adalah sebesar Rp. 73.262.213.153. Realisasi anggaran ini melebihi alokasi dana tahun 2024 dikarena ada alokasi dana yang dipergunakan untuk membayar hutang pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2023.

23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional

Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional memiliki kegiatan Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital untuk bayi baru lahir dan juga specimen penyakit ILI yaitu sindrom mirip influenza. Tujuannya adalah untuk deteksi dini kedua penyakit tersebut agar tidak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sub Kegiatan ini mendapatkan dukungan Anggaran sebesar Rp. 90.200.000 dan apada akhir anggaran telah teralisasi sebesar Rp. 27.976.000

24. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Alokasi Anggaran yang disediakan untuk sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebesar Rp. 99.999.835. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan Penilaian Kabupaten Sehat di Kota Bandar Lampung. Namun demikian, pada Tahun ini tidak ada penilaian Kabupaten/Kota Sehat oleh Kementrian terkait sehingga realisasi hingga akhir tahun tidak dapat digunakan.

Meskipun demikian, kegiatan terkait Kabupaten/Kota Sehat di Tingkat Puskesmas tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran kegiatan yang dilakukan bersifat rutin

25. Operasional Pelayanan Puskesmas

Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar Rp. 6.011.467.000. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan operasional Puskesmas Rawat INap dan Non Rawat Inap juga Puskesmas Pembantu. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa pengadaan alat tulis kantor, biaya cetak dan pengadaan keperluan pelayanan di Puskesmas induk dan pembantu, Jasa tenaga kebersihan, Pengadaan fasilitas pelayanan lainnya.

Realiasi anggaran pada akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.845.243.204 atau 97,23 %. Selain untuk pembiayaan kegiatan, realiasi anggaran juga berupa pembayaran Hutang kegiatan Operasional pelayanan Kesehatan Tahun 2023.

26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Dukungan Anggaran Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya adalah sebesar Rp. 19.539.187.650. Penggunaan anggaran adalah untuk biaya sewa Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), Insentif kader Posyandu, Kader Poskeskel dan Kader Posyandu Lansia. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 14.543.648.377 atau 74,44 %. Selain untuk pembiayaan kegiatan tahun 2024, realisasi anggaran juga digunakan untuk pembayaran hutang kegiatan yang sama pada tahun 2023

27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Penilaian Akreditasi Puskesmas merupakan Penilaian pelayanan yang dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh

Kementrian Kesehatan. Penilaian dilakukan untuk menjamin bahwa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Penilaian akreditasi dilakukan tiga tahun sekali untuk setiap fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pada tahun anggaran 2024, alokasi dana untuk Pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan adalah sebesar Rp. 91.018.419 dan terealisasi sebanyak Rp. 83.617.500 atau 91,87 %. Selain digunakan untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2024, Realisasi anggaran juga digunakan untuk membayar hutang kegiatan tahun lalu.

28. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca Imunisasi dan Pemberian obat Massal)

Dukungan Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 116.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 116.700.000 atau 99,83 %. Penggunaan anggaran ditujukan untuk investigasi kasus kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaksanakan rutin ataupun imunisasi lainnya pada bayi atau anak sekolah. Pada Tahun 2024 KIPI serius tidak ditemukan dan KIPI non serius sebanyak 1.105 kasus yang telah ditangani oleh tenaga Kesehatan.

Output sub kegiatan ini adalah mengeliminir dampak negatif imunisasi terhadap Kesehatan individu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini akan memiliki dampak terhadap peningkatan cakupan layanan imunisasi di Kota Bandar Lampung dan dapat mengurangi angka kesakitan yang dapat dicegah oleh imunisasi.

29. Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah

Sub kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah pada tahun 2024 mendapat alokasi Anggaran Rp. 308.797.302 dan Anggaran terealisasi sebesar Rp. 307.492.500 atau 99,58 %.

Penggunaan anggaran dipergunakan untuk :

- penggandaan Buku Pedoman penanggulanag KLB dan keracunan makanan
- Penggandaan buku Pedoman penanggulangan penyakit PD3I.
- Pertemuan dan sosialisasi
- Supervisi dan bimbingan teknis program

Selain itu, penggunaan anggaran juga diperuntukan untuk pembayaran hutang kegiatan pada tahun 2023.

30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Dukungan Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 464.940.000 dan terealisasi Rp. 351.715.000 atau 75,65 %. Penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan Sosialisasi Petunjuk teknis pelaksanaan program, peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis dan juga untuk pelayanan lainnya yang terkait penderita Tuberkulosis di Puskesmas. Selain itu penggunaan anggaran juga untuk pemabayaran hutang kegiatan tahun 2023.

31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Alokasi Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 195.700.000 dan terealisasi Rp. 144.150.000 atau 73,65 %. Penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan Pelayanan pemeriksaan tes HIV pada kelompok bersioko, supervise dan bimbingan teknis program, Pertemuan evaluasi dan validasi data serta pelayanan Kesehatan orang dengan HIV lainnya.

32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Malaria mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 84.913.024. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan larvasida, pengadaan BMHP Laboratorium Kit sederhana, pengadaan RDT Combo Malaria, Supervisi dan bimbingan teknis program. Penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 76.589.534 atau 90,20 %

33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebesar Rp. 951.500.000. Seluruh kegiatan dari pelayanan Kesehatan reproduksi dilaksanakan di Puskesmas dengan kegiatan antara lain : Penyuluhan, pemeriksaan Kesehatan Pasangan usia subur, sosialisasi program di Sekolah dan pelayanan Kesehatan lainnya. Penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 827.949.351 atau 86,97 %

34. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak sepenuhnya dilakukan di Puskesmas. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.334.010.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.975.686.500 atau 84,65%

2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan. Dukungan Anggaran adalah sebesar Rp. 291.999.165 dan terealisasi sebesar Rp. 218.942.200 atau 74,98 %. Penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan :

- Sewa Web site dan maintenance
- Operasional Web site dan Wifi
- Honor dan upah operator Web site dan Wifi

- Belanja Komputer

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan pada Anggaran Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.847.623.761. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pada akhir tahun pelaksanaan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.489.875.390 atau terealisasi 80,64 %.

Output kinerja program adalah peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya.

Perincian kegiatan pada program ini sebagai berikut :

3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar terdiri dari 2 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 336.754.820 dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 251.603.750. Perincian sub kegiatan dalam kegiatan ini adalah sbb :

1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Sub Kegiatan ini mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 99.999.820 dan pada akhir anggaran terserap anggaran sebesar Rp.71.431.750.

Pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan ini terdiri dari :

- Pertemuan pengelola SISDMK dan Pengelola ASPAK
- Supervisi dan Bimbingan Teknis

2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Alokasi Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 236.755.000 dan terealisasi sebesar Rp. 180.172.000 atau 76,1 %

Pelaksanaan Kegiatan sub kegiatan ini antara lain :

- Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam penyusunan kebutuhan obat
- Pertemuan Pembinaan TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter) oleh dokter spesialis

3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini mendapatkan dukungan Anggaran sebesar Rp. 1.510.868.941 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.238.271.640 atau 81,96 %

Rincian pelaksanaan kegiatan pada Sub ini antara lain :

- Pertemuan peningkatan kompetensi dasar Tenaga Kesehatan dalam pembinaan kader posyandu
- Pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita bagi kader

IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman terdiri dari 3 Kegiatan dan masing masing kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran Program ini pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 351.763.000. Output kinerja terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi fasilitas sarana kefarmasian (apotek, toko obat dan alat kesehatan) dan indsutri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar

Rp. 340.343.600 atau sebesar 96,88 %. Perincian Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

4.1 Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan

1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.730.000 dan telah terealisasi Rp. 63.235.000 atau 99,98 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah :

- Pertemuan koordinasi lintas sektor,
- pendampingan perbaikan dalam rangka perizinan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan, optikal dan UMOT
- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program

3.3 Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1. Pemeriksaan post market pada produk makanan dan minuman industry rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

Dukungan Anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 184.214.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 173.304.800 atau 94,08 %. Pelaksanaan kegiatannya yaitu :

- Pertemuan lintas sektor dalam rangka Pengawasan Industri Rumah Tangga
- Sosialisasi hasil pengawasan
- Supervisi dan Bimbingan Teknis Program

3.4 Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT

Sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.819.000 dan pada akhir Tahun anggaran terealisasi Rp. 103.803.800 atau sebesar 99,99 %.

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 terbagi dalam 3 Kegiatan dan masing masing kegiatan terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

Alokasi Anggaran Program ini sebesar Rp. 1.079.016.772 dan telah terealisasi sebesar Rp. 961.120.000 atau sebesar 89,16 %. Perincian realisasi anggaran program ini adalah sbb :

5.1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dukungan Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 576.499.918 dan telah terealisasi Rp. 573,570.000 atau 99,49 %. Realisasi anggaran juga digunakan untuk pembayaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Output kegiatan adalah terlaksananya advokasi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung menghibahkan dana ke Palang Merah cabang Kota Bandar Lampung pada TA 2024 ini yaitu sebesar 375.500.000

5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi Rp. 97.650.000 atau 97,65 %

Dinas Kesehatan melalui sub Kegiatan turut berpartisipasi event tingkat Kota Bandar Lampung dan Tingkat Provinsi Lampung untuk mempromosikan gerakan PHBS. Kegiatan yang dimaksud adalah Bandar Lampung Ekspo dan Pekan Raya Lampung

5.3 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 401.516.845 dan pada akhir tahun terealisasi anggaran sebesar Rp. 289.900.000 atau 72,20 %.

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan juga oleh seluruh UPT.Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pertemuan lintas sector Pokjanal Posyandu tingkat Kota dan Kecamatan, Pendampingan pelaksanaan Posyandu Balita, Supervisi dan Bimbingan Teknis Program

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya maka target-target Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat disimpulkan antara lain :

1. Jumlah kasus kematian ibu sejak tahun 2024 di Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2024 ini berfluktuatif namun tetap dapat dikendalikan sehingga jumlah kasus masih dibawah target yang telah ditetapkan. Berbagai upaya dan sumber daya telah diarahkan untuk menekan dan mengendalikan jumlah kasus kematian ibu melahirkan, sosialisasi, peningkatan kapasitas petugas, peran aktif petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi. Kerja sama lintas sektor, kelurahan, kecamatan guna meningkatkan kesadaran keluarga peduli terhadap anggota keluarga yang sedang hamil untuk secara rutin memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Jumlah kasus kematian ibu di tahun 2023 sebanyak 6 Kasus, lebih rendah dari target yaitu 10 kasus.
2. Pada tahun 2020 Kasus kematian bayi di Kota Bandar Lampung berjumlah 34. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 60 kasus. Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi kembali meningkat menjadi 69 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi sebanyak 91 kasus. Jika dibandingkan antara realisasi dan target dihasilkan capaian kinerja 48,33%. Untuk tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi sebesar 84 kasus dari target 60. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 kasus kematian bayi menurun, namun

jumlah kasus masih diatas target yang ditetapkan sebesar 60 kasus dengan capaian kinerja 60%. Kondisi ini menggambarkan kinerja belum maksimal. Capaian kinerja di tahun berikutnya diharapkan bisa mencapai 100 % dengan jumlah kasus dibawah target. Penyebab kematian ini sebagian disebabkan karena berat bayi lahir rendah (BBLR), selebihnya dikarenakan asfiksia (gangguan nafas), kelainan bawaan dan penyakit infeksi. Kondisi kesehatan ibu saat kehamilan sangat menentukan kesehatan bayinya pada saat dilahirkan, untuk itu berbagai upaya diarahkan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil resiko tinggi (kekurangan energi protein kronis/KEK).

3. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek dari pada standar usianya. Pada Tahun 2024 jumlah stunting di Kota Bandar Lampung berdasarkan operasi timbang 0,5% dengan target 4,3%, capaian kinerja 188%. Capaian kinerja yang baik diatas 100% menunjukkan upaya keberhasilan dalam pengendalian kasus balita stunting di Kota Bandar Lampung.
4. Realisasi anggaran di tahun 2024 dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 404.282.385.123,00 dengan realisasi sebesar Rp. 320.956.155.132,72 (79,39 %). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 5 program, 16 kegiatan, dan 71 sub-kegiatan kesehatan termasuk program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat rutin dilaksanakan.

4.2. PEMECAHAN MASALAH

Upaya yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengendalian kasus kematian ibu dan balita perlunya penguatan dukungan petugas dan kerjasama dengan dokter spesialis kandungan dalam upaya memberikan pemahaman kepada ibu hamil terkait resiko kehamilan dan persalinan yang bisa terjadi merupakan faktor keberhasilan pencapaian kinerja, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil resiko tinggi (kekurangan energi protein kronis/KEK).
2. Untuk pengendalian kasus stunting Dukungan dan kerjasama stakeholder/pemangku kepentingan melalui tim percepatan penurunan stunting menjadi faktor keberhasilan kedepan dalam upaya penurunan kasus stunting.
3. Prioritas kebutuhan yang berbasis program dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memaksimalkan hasil yang dicapai sesuai dengan Visi, Misi Wali Kota Bandar Lampung BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”
4. Memperkuat kembali komitmen dan peran lintas sektor dan lintas program untuk keberhasilan kegiatan pembangunan bidang kesehatan karena program kesehatan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan dan partisipasi semua stakeholder. Karena urusan dan permasalahan kesehatan menyangkut sektor lain di luar bidang kesehatan



LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

S

BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

**TC.33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				256,859,246,000			
1.02	KESEHATAN				256,859,246,000			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEHATAN	persen	98	166,096,746,000			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	persen	100	25,000,000	APBD		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	25,000,000	APBD		
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	persen	100	77,756,000,000	APBD		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1,194	77,540,000,000	APBD		
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	216,000,000	APBD		
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	100	50,000,000	APBD		
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10	50,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	100	255,500,000	APBD		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	30,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10	7,500,000	APBD		
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	8,000,000	APBD		
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	75,000,000	APBD		
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98	280,000,000	APBD		
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1		APBD		
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1		APBD		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	100,000,000	APBD		
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	180,000,000	APBD		
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	persen	100	20,337,500,000	APBD		

KODE REKENING	UKUSAN/BIDANG UKUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PERIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	170,000,000	APBD		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	20,167,500,000	APBD		
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	100	695,900,000	APBD		
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	30,000,000	APBD		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit mobil. 38 unit motor	455,900,000	APBD		
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	10,000,000	APBD		
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	150,000,000	APBD		
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50,000,000	APBD		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Unit Kerja	31	66,696,846,000	BLUD		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Unit Kerja	31	66,696,846,000	BLUD		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN	angka	2.00	89,292,500,000	APBD		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82.00	16,969,000,000	APBD		
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	Unit	3	8,500,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	189,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	3,400,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	1.00	3,700,000,000	APBD		
1.02.02.2.01.17	pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	1.00	1,000,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	1.00	180,000,000			
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82.00	72,173,500,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19592	500,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18702	300,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	17811	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	86512	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	155442	300,000,000	APBD dan DAK		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PERIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	754465	350,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	92994	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	200001	300,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18644	300,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1882	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	23474	500,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	28060	300,000,000	APBD		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	750,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	350,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	300,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1,851	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1,851	150,000,000	APBD		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	29,500,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kab/kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	18,300,000,000	APBD		

KODE REKENING	UKUSAN/BIDANG UKUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	15,573,500,000	APBD		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	12	1,150,000,000	APBD		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	300,000,000	APBD		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	80	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	70	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	30	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	80	150,000,000	APBD		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	100,000,000	APBD		
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	50,000,000	APBD		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	persen	80	300,000,000	APBD		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusi Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82	200,000,000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	50	100,000,000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	100,000,000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	82	100,000,000	APBD dan DAK		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensiny	orang	200	100,000,000	APBD dan DAK		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar	persen	95	400,000,000	APBD dan DAK		
1.02.04.2.01	Memberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	persen	100	150,000,000	APBD dan DAK		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1	150,000,000	APBD dan DAK		
1.02.04.02.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	persen	80	150,000,000	APBD dan DAK		

KODE REKENING	UKUSAN/BIDANG UKUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PERIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.04.02.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	150,000,000	APBD		
1.02.04.02.06	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	persen	100	100,000,000	APBD		
1.02.04.02.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	50	100,000,000	APBD dan DAK		

KODE REKENING	UKUSAN/BIDANG UKUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024		SUMBER DANA	PERIORITAS	
				TARGET KINERJA	RUPIAH		DAERAH	NASIONAL
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat ber PHBS	persen	75	770,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	74	420,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	420,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	82	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	250,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	82	100,000,000	APBD dan DAK		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	100,000,000	APBD dan DAK		
		JUMLAH			256,859,246,000			



**DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN
KINERJA DAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BABI. PENDAHULUAN	1
LATARBELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
RUANG LINGKUP	4
DASAR HUKUM	4
MANFAAT	6
BABII.PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA.....	8
PRINSIP PENGUKURAN KINERJA	9
MEKANISME PENGUKURAN KINERJA.....	11
PENJENJANGAN PENGUKURAN KINERJA.....	19
POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	21
BABIII.PENUTUP	23



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi/Interval Capaian Kinerja sesuai dengan Tabel T-E.1 Permendagri nomor 86 Tahun 2017.....	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.....	12
Tabel 2.3	Formulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang termuat dalam IKU dan IKK Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.....	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	<i>Logical Framework</i> Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.....	1 1
Gambar2.2	Rumusan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencapaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.....	16
Gambar2.3	<i>Cascading</i> Penjenjangan Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026.....	20



BAB I PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Data Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai atau mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan atau hasil kerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau individu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun pengumpulan data kinerja merupakan proses pengumpulan informasi atau data mengenai kinerja yang telah dilakukan dalam suatu organisasi atau individu. Data kinerja ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan kegiatan, hasil survei, evaluasi dan monitoring, atau dari system informasi manajemen. Tujuan dari pengumpulan data kinerja adalah untuk memberikan informasi yang akurat, terukur dan objektif tentang kinerja yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik, melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja, dan untuk memantau pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam organisasi atau instansi pemerintah, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan memiliki data dan informasi yang akurat dan terukur, maka akan memudahkan dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif serta dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa dalam penetapan variabel dan bobot penilaian pelaksanaan evaluasi AKIP, komponen Pengukuran Kinerja mempunyai bobot 30% dimana sub komponen yang dinilai/dievaluasi meliputi:



1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punish ment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku berupa pedoman pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian output dan outcome yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Pedoman tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat. Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana mengukur dan mengumpulkan data kinerja dengan cara yang sistematis, akurat, dan konsisten dalam rangka mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Beberapa maksud dari penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Membantu untuk mengukur kinerja secara objektif dan akurat.
2. Menjaga konsistensi dalam pengumpulan data kinerja, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan dianalisis secara efektif.
3. Menetapkan standar yang jelas dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data.
4. Memberikan panduan bagi personel yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan data kinerja, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat dan efektif.

Dengan penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang baik, maka Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat mengumpulkan data yang akurat dan konsisten, dan dapat menggunakan data tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup tata cara pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;

MANFAAT

Beberapa manfaat disusunnya Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Memastikan konsistensi
Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja ini dapat membantu memastikan bahwa proses pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, data kinerja yang dihasilkan dapat dibandingkan dan dianalisis dengan lebih mudah dan akurat.



2. Menjamin akurasi

Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja ini dapat membantu memastikan bahwa data kinerja yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Ini dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam membuat keputusan yang lebih baik, serta membantu dalam memonitor dan meningkatkan kinerja.

3. Mempercepat proses

Dengan adanya Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja yang jelas, proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Ini dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk merespons perubahan dalam waktu yang lebih cepat.

4. Meningkatkan efektivitas

Dengan memahami dan mengikuti pedoman teknis ini, personel yang bertanggung jawab dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dapat menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan tugas serta meminimalkan kesalahan dan kehilangan waktu.

5. Memperbaiki komunikasi

Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja ini dapat membantu meningkatkan komunikasi di antara personel yang bertanggung jawab dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Hal tersebut dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja, serta tujuan dari pengumpulan data tersebut.



BABII

PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, hal penting yang harus dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja dan mengintegrasikan data kinerja dari bidang-bidang yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja;
2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah diperjanjikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.



PRINSIP PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Secara teknis, Persentase Capaian Target menggunakan dua jenis rumus dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi.

Penggunaan Rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Penggunaan Rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, yaitu sebagai berikut

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Klasifikasi/Interval Capaian Kinerja sesuai dengan Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

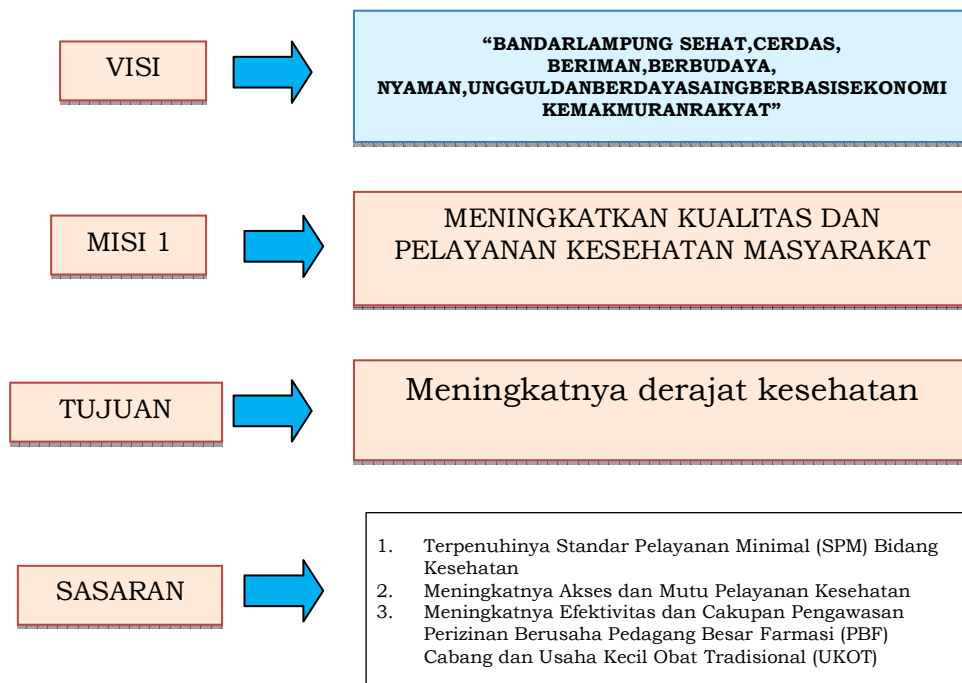


MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

Data Indikator Kinerja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dimana Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terdapat dalam Lampiran 02 Peraturan dimaksud. Adapun terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada indikator sub kegiatan mengalami validasi disesuaikan dengan ketetapan dalam Keputusan dimaksud.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas bidang urusan kesehatan, menunjang pencapaian Misi 1 Wali Kota Bandar Lampung. Berikut adalah *Logical framework* kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026:

Gambar 2.1 *Logical framework* Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026



Adapun capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang menjadi indikator keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, meliputi:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya derajat kesehatan	1.1.1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1 Angka Harapan Hidup (AHH)
		2 Laju Pertumbuhan penduduk
		1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan
		3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		4 Pelayanan Kesehatan Balita
		5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
	1.1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
		14 Insidensi TB per 100.000 penduduk
		15 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
	1.1.3 Meningkatkan Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
17 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		
18 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		



TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan demikian target kinerja yang ditetapkan merupakan target pencapaian pada akhir periode Renstra (Tahun 2026). Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya derajat kesehatan” Tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu:

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)
- 2) Laju Pertumbuhan penduduk

SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Renstra Tahun 2021-2026 meliputi:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)
		Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)			
	2 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama			
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	
	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama				
4 Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan	
	Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama				



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan
					kesehatan sesuai standar
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	X	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.			
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar kurun waktu satu	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar
		Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.			
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama			
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama			pelayanan kesehatan sesuai standar
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.			
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
		Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.			
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang
		Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.			
	12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama			



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan		
	(Human Immunodeficiency Virus)						
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah Kematian ibu	X	100 000	Indikator ini untuk mengukur angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kota Bandar		
		Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu					
	14 Insidensi TB per 100.000 penduduk	Jumlah penemuan penderita baru TB	X	100 000		Indikator ini untuk mengukur presentase tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	
		Jumlah penduduk pada satu tahun tertentu					
	15 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Jumlah bayi usia 12-23 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu tahun tertentu	X	100			Indikator ini untuk mengukur Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
		Jumlah bayi usia 12-23 bulan pada satu tahun tertentu					
Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
		Jumlah seluruh Puskesmas pada satu tahun tertentu					
	17 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Jumlah penduduk usia 10-18 tahun yang merokok	X	100			
		Jumlah penduduk usia 10-18 tahun pada satu tahun tertentu					
18 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan pada satu tahun tertentu	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan pada satu tahun tertentu						



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Rumusan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

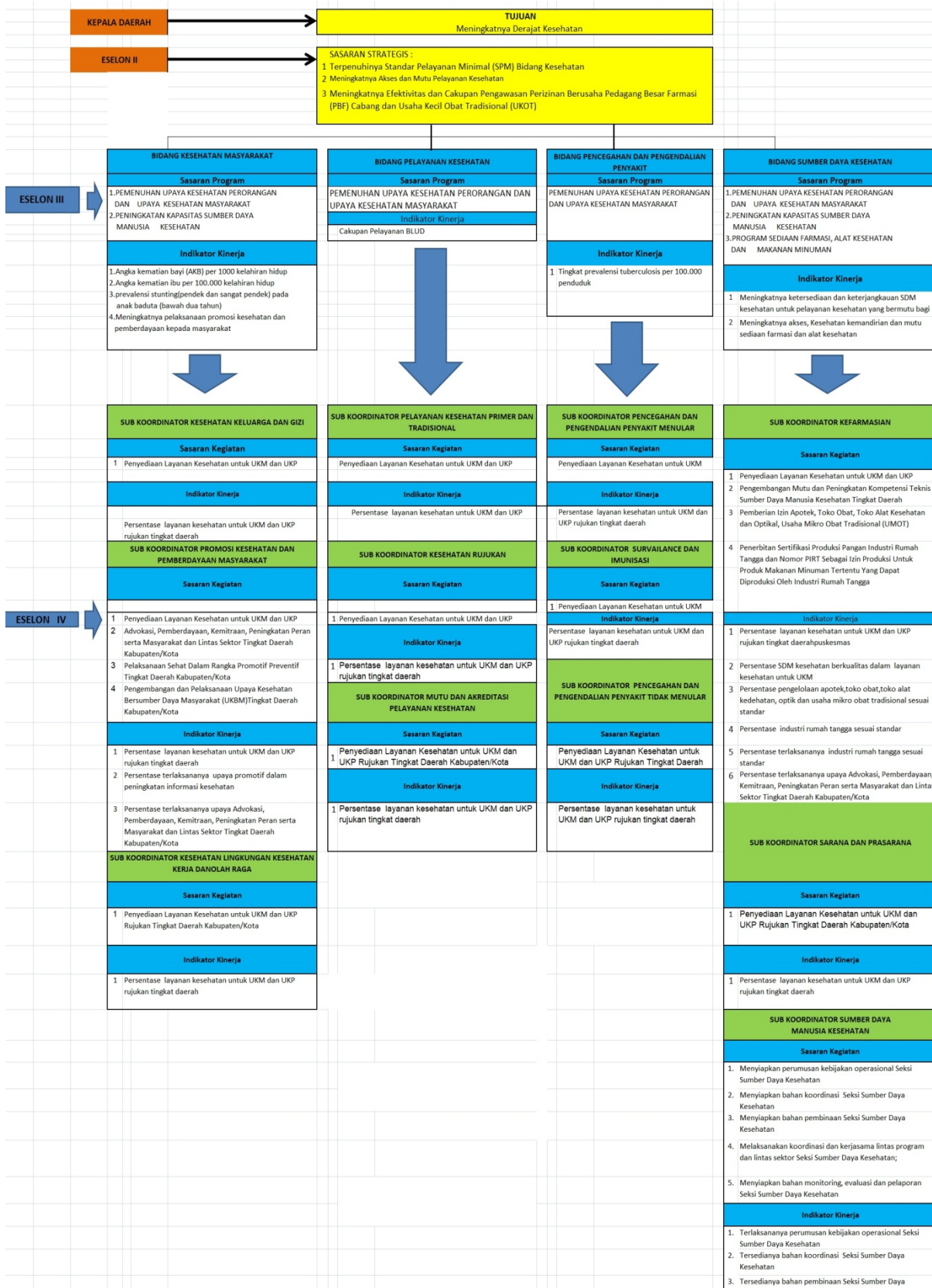
NO	PROGRAM/KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
11	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
V	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
16	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
17	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga



PENJENJANGAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dilakukan pada tingkat/jenjang Kepala Dinas, Esselon III yang meliputi Sekretaris dan Kepala Bidang (Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Sumber Daya Kesehatan), Esselon IV/Fungsional (Fungsional Perencana, administrasi Kesehatan) Berikut adalah cascading penjenjangan pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Gambar 2.3 *Cascading* Penjenjangan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.





POLA ANALIS CAPAIAN KINERJA

Setiap pernyataan kinerja sesuai dengan penjenjangan kinerja (*cascading*) dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau IKU Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan.

Klasifikasi/Interval capaian kinerja mengacu pada Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 diatas serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.



BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan, dan program pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja ini menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.



PIT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
Nip. 19691202 199503 2 002

